

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia secara aktif mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs), program global yang diikuti oleh 194 negara. Program ini menjadi agenda utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mencakup berbagai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara global (Central Bureau of Statistics, 2016). Dalam konteks ini, peran lembaga keuangan, khususnya bank Syariah, menjadi krusial dalam mendukung implementasi SDGs. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan serangkaian tujuan pembangunan global yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015. Salah satu tujuan utama dari SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuk dan skala pada tahun 2030. Kemiskinan di SDGs tidak hanya diukur dari aspek pendapatan, tetapi juga mencakup akses yang adil terhadap sumber daya, layanan dasar, dan kesempatan yang sama untuk semua. Tujuan SDG terkait kemiskinan tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi juga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan ekonomi bagi mereka yang terpinggirkan. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan pekerjaan yang layak. Dengan demikian, tujuan SDG terkait kemiskinan bertujuan untuk mengatasi penyebab utama kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi semua orang.

Meskipun tingkat kemiskinan telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, fenomena kemiskinan di Indonesia saat ini masih menjadi tantangan yang

signifikan. Ketimpangan ekonomi yang persisten, terutama antara kota dan pedesaan serta antarwilayah di Indonesia, merupakan salah satu komponen utama yang menyebabkan kemiskinan. Selain itu, kemiskinan ini disebabkan oleh masalah akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Di Indonesia, kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti kurangnya infrastruktur di daerah terpencil, kurangnya kesempatan kerja formal, dan rendahnya pendidikan dan keterampilan sebagian masyarakat. Isu-isu sosial seperti pernikahan usia muda, tingginya angka kelahiran, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi juga seringkali dikaitkan dengan fenomena kemiskinan. Program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan keterampilan adalah beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, namun, diperlukan kerja keras dan kerja sama dari berbagai pihak untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia secara signifikan dan berkelanjutan.

Bank syariah biasanya didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang fokus utamanya adalah penyimpanan, pembiayaan, dan layanan pembayaran. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mencakup aturan yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, bank syariah harus menghindari berpartisipasi dalam bisnis yang mengandung riba serta segala sesuatu yang bertentangan dengan syariah Islam. Beberapa hal membedakan bank syariah dari bank konvensional. Yang paling penting adalah bahwa bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam seluruh operasi mereka, sedangkan bank konvensional menggunakannya. Hal ini memiliki dampak yang sangat besar dan berdampak pada produk dan fitur operasi bank syariah (Agustin,

2021). Sejalan dengan pendapat Mawaddah (2015), bank Syariah adalah bank yang mengacu pada hukum Islam ketika mereka mengumpulkan dana dan menyalurkannya. Dalam operasinya, mereka tidak membebankan bunga atau membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah dan yang dibayar oleh nasabah bergantung pada perjanjian dan akad antara nasabah dan bank. Perbankan Syariah berbeda dengan bank konvensional karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis Islam. Fungsi utama bank Syariah adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sesuai dengan prinsip Syariah.

Pengumpulan dana dilakukan di bank Syariah melalui produk seperti tabungan, giro, dan deposito. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Syariah, sistem perbankan Syariah menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin melakukan transaksi finansial berdasarkan prinsip Islam. Produk perbankan Syariah tetap universal dan dapat diakses oleh semua golongan masyarakat. Sesuai dengan jenis akadnya, layanan perbankan syariah menyediakan berbagai produk, seperti musyarakah, murabahah, wakalah, kafalah, hawalah, rahn, qard, dan sharf, yang memungkinkan masyarakat untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka sambil tetap mempertahankan prinsip Syariah dalam aktivitas keuangan mereka.

Perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat karena kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jumlah bank syariah dan produk dan layanan yang mereka tawarkan terus meningkat. Dengan memenuhi keinginan orang-orang yang ingin bertransaksi dan berinvestasi sesuai

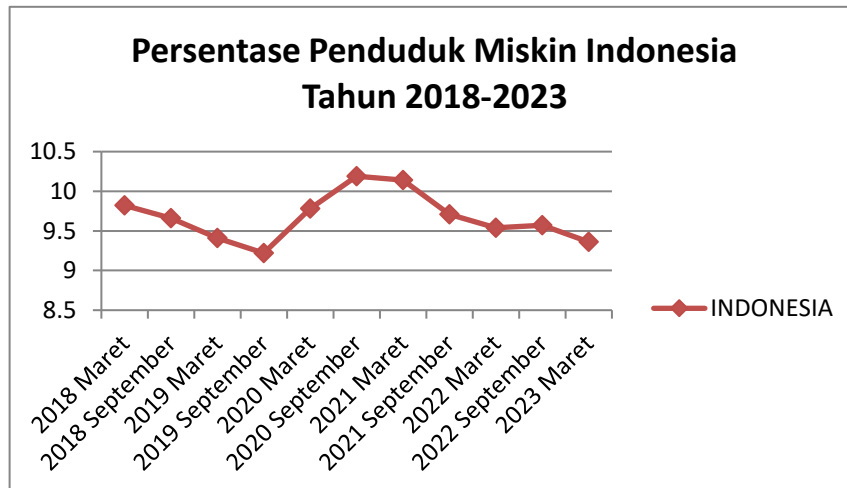
dengan prinsip syariah, bank syariah semakin berperan dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Tetapi masih ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Ini termasuk memberikan pendidikan yang lebih luas tentang prinsip dan barang syariah, dan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah yang berkelanjutan.

Bank di Indonesia bertanggung jawab untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat, sesuai dengan tujuan sosial yang telah diatur dalam undang-undang sejak abad ke-19. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) seharusnya berfokus pada perbankan syariah. Saat ini, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan besar dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Bank-bank syariah aktif membiayai proyek yang membantu mencapai SDGs seperti infrastruktur berkelanjutan, energi terbarukan, dan pertanian berkelanjutan. Selain itu, mereka mendukung inklusi keuangan dengan menyediakan layanan perbankan kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan tradisional. Karena prinsip-prinsipnya yang mengutamakan keadilan dalam bertransaksi, bank syariah juga berperan penting dalam mendorong keadilan dan kesetaraan. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan peran bank syariah dalam mencapai semua target SDGs, terutama dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keuntungan ekonomi syariah. Prinsip-prinsip yang mendasari keuangan syariah sudah sangat selaras dengan tujuan SDGs, kata Deden Firman Hendarsyah, Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Prinsip-prinsip tersebut antara lain

mencakup bagi hasil, menghindari riba, menghindari spekulasi, dan memastikan bahwa setiap transaksi didukung oleh sektor riil.

Meningkatkan standar hidup masyarakat adalah salah satu dari 17 tujuan sosial, dan ini sejalan dengan tujuan ke-8, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Central Bureau of Statistics, 2016). Kajian ini berfokus pada penyaluran dana melalui konsep Qardhul Hasan, Murabahah, dan Musyarakah di bank Syariah untuk mencapai tujuan sosial tersebut. Bank biasanya tidak mengejar keuntungan yang berlebihan dari pembiayaan yang diberikan kepada pelanggan. Ini mengurangi beban pelanggan dan meningkatkan daya beli mereka, mendorong sektor riil ekonomi (Adekola, 2016).

Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik mengatur langkah-langkah yang harus diambil oleh lembaga keuangan di Indonesia untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, yang diharapkan akan membawa transformasi sistem keuangan nasional melalui penerapan SDGs. Dengan demikian, diharapkan bahwa akan ada kontribusi yang signifikan dalam implementasi SDGs. Selain itu, POJK ini mengatur pembangunan sosial, dengan tujuan meningkatkan keseimbangan pendapatan dan mengentaskan kemiskinan melalui peran ekonomi dan keuangan Syariah dalam SDGs. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah instrumen yang tersedia dalam ekonomi dan perbankan syariah untuk mengurangi kemiskinan dan menyamakan tingkat pendapatan masyarakat, menurut Deden.



Gambar 1. 1
Data kemiskinan di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di beberapa wilayah Indonesia berubah dari tahun 2018 hingga 2022. Misalnya, Indonesia mengalami penurunan jumlah penduduk miskin dari 26.363,27 ribu menjadi 25.898,55 ribu pada tahun 2022, dan Jawa Barat mengalami penurunan dari 4.070.98 ribu menjadi 3.888.6 ribu pada tahun yang sama.

Indonesia telah menetapkan bahwa salah satu tujuan utama dari Sustainable Development Goals (SDGs) adalah mengakhiri kemiskinan. Karena prinsip-prinsipnya yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, perbankan Syariah sangat penting dalam konteks ini. Prinsip-prinsip seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan bagi hasil membantu memperbaiki ekonomi orang-orang yang kurang mampu dan mengurangi perbedaan sosial. Dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, bank syariah memainkan peran penting. Bank syariah dapat membantu orang-orang yang kurang mampu mendapatkan akses ke uang dengan mengutamakan keadilan sosial dan distribusi yang adil. Mereka memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih inklusif, seperti pembiayaan mikro

dan kredit untuk usaha kecil dan menengah (UKM), yang merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang di Indonesia. Bank syariah juga dapat membantu membiayai proyek pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak sosial, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pertanian berkelanjutan, dan energi terbarukan. Proyek-proyek ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, bank syariah memiliki kemampuan untuk menjadi partner strategis bagi pemerintah dan organisasi lain dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Perbankan Syariah juga dapat membantu orang atau komunitas yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka melalui program zakat dan sedekah. Dengan demikian, pengembangan perbankan Syariah yang lebih kuat dan inklusif dapat sangat membantu dalam upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai target-target SDGs, terutama di daerah-daerah di mana tingkat kemiskinan masih tinggi.

Peran bank dalam mendorong pertumbuhan ekonomi telah terbukti di banyak negara. Selain memberikan insentif kepada pelanggan untuk menabung atau deposit, penerapan kebijakan perbankan yang efektif dapat meningkatkan kinerja sektor perbankan (Alkhazaleh, 2017; Klein & Weill, 2018). Namun, bank dengan orientasi *falah* cenderung menuntut keuntungan yang lebih rendah dari pinjaman yang diberikan. Ini memberi pelanggan kesempatan untuk memperbaiki keuangan mereka dengan mengelola lebih banyak aset di sektor riil (Murerwa, C. B. (2015).

Meskipun studi sebelumnya telah merefleksikan pentingnya kebijakan moneter berdasarkan prinsip bagi hasil (PLS), bukti yang terbatas telah disajikan

untuk menggantikan kebijakan moneter konvensional berbasis bunga saat ini (Chulho & Ryu, 2017). Ada argumen teoritis tentang keterjangkauan kebijakan moneter bebas bunga (Selim & Hassan, 2019). Namun, argumen teoritis ini belum pernah dibuktikan secara empiris. Selim dan Hassan (2019) memberikan kontribusi signifikan dalam literatur keuangan Islam dengan temuan mereka. Namun, studi ini terutama berfokus pada perbandingan tingkat inflasi dan pengangguran antara negara-negara dengan tingkat bunga positif dan nol atau negatif. Dalam situasi tersebut, studi ini memberikan kontribusi asli dengan menyediakan bukti empiris, menggunakan sampel global, mengenai penerapan pembiayaan berbasis Qard Hasan pada pembangunan berkelanjutan.

Penyaluran dana pinjaman qardh oleh bank Syariah merupakan indikator yang mencerminkan upaya perbankan dalam mendukung kegiatan keuangan Syariah. Fenomena penyaluran dana qardhul hasan di Indonesia saat ini menggambarkan keberadaan praktek keuangan berbasis syariah yang semakin berkembang. Qardhul hasan adalah praktek peminjaman dana tanpa bunga yang dilakukan dengan niatan untuk membantu individu atau kelompok yang membutuhkan. Dana yang dipinjamkan dalam Qardhul Hasan biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau untuk modal usaha, dengan janji bahwa dana akan dikembalikan tanpa biaya dalam jangka waktu tertentu. Fenomena ini biasanya terjadi di Indonesia pada skala kecil, seperti antara individu atau dalam komunitas kecil. Misalnya, seseorang yang membutuhkan modal dapat meminjam uang dari teman atau keluarga mereka dengan janji untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu tanpa bunga. Fenomena ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan gotong royong dalam masyarakat

Indonesia, di mana membantu sesama dianggap sebagai suatu kewajiban moral. Namun demikian, meskipun prinsip qardhul hasan secara konseptual dapat diterapkan dalam skala yang lebih besar, seperti dalam institusi keuangan syariah atau program pemerintah, namun implementasinya masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peraturan dan regulasi yang mengatur keuangan syariah di Indonesia, serta tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah. Meskipun demikian, fenomena penyaluran dana qardhul hasan tetap menjadi bagian penting dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia, yang terus berkembang seiring dengan peningkatan pemahaman dan minat masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan berbasis syariah.

Kemudian, pada pembiayaan murabahah juga menjadi salah satu bentuk kontribusi perbankan Syariah dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Dan adapun pembiayaan musyarakah menjadi bagian paling penting dari upaya perbankan syariah dalam memberikan dukungan finansial untuk proyek-proyek bisnis yang melibatkan kejasama antara bank dan pihak nasabah.

Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa bank Syariah di Indonesia telah berpartisipasi secara aktif dalam penyediaan pembiayaan Musyarakah; ini menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung prinsip-prinsip keuangan syariah dan membantu pertumbuhan sektor ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan evaluasi konteks yang disebutkan di atas, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian mendalam yang akan dikenal sebagai:

"PENYALURAN DANA QARDHUL HASAN, MURABAHAH,

MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH PERIODE 2018-2023 TERHADAP IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS"

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut berdasarkan latar belakang dan batasan masalah:

1. Bagaimana pengaruh penyaluran dana Qardhul Hasan di bank syariah periode 2018-2022 terhadap implementasi sustainable development goals?
2. Bagaimana pengaruh murabahah di bank syariah periode 2018-2022 terhadap implementasi sustainable development goals?
3. Bagaimana pengaruh musyarakah di bank syariah periode 2018-2022 terhadap implementasi sustainable development goals?
4. Bagaimana pengaruh penyaluran dana qardhul hasan, murabahah, musyarakah di bank syariah pada periode 2018-2022 terhadap implementasi sustainable development goals?

1.2.1 Bagi Peneliti

Peneliti berharap penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan tentang keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan. Mereka akan memperoleh pengalaman dalam menganalisis kinerja keuangan bank syariah dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana strategi pembiayaan memengaruhi pencapaian SDGs.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran dana Qardhul Hasan di bank syariah periode 2018-2022 terhadap implementasi sustainable development goals
2. Untuk mengetahui pengaruh murabahah di bank syariah periode 2018-2022 terhadap implementasi sustainable development goals
3. Untuk mengetahui pengaruh musyarakah di bank syariah periode 2018-2022 terhadap implementasi sustainable development goals
4. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran dana qardhul hasan, murabahah, musyarakah di bank syariah pada periode 2018-2022 terhadap implementasi sustainable development goals.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Perusahaan

Penelitian dapat membantu bisnis memahami kinerja keuangan yang lebih baik, membantu mereka menemukan cara untuk memperbaiki strategi pembiayaan mereka, dan memberikan dasar untuk membuat keputusan yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan dan pencapaian tujuan mereka.

1.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut tentang strategi pembiayaan dan bagaimana hal itu berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Hasil dan metodologi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang lebih mendalam atau untuk mencakup bank syariah lainnya.